

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi di setiap negara dunia agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Dalam Michael P. Todaro mengatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengetasan kemiskinan. Dengan demikian keberhasilan pembangunan diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.¹

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan disuatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu siklus ke berikutnya kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, disebabkan oleh faktor yang mengalami dari segi jumlah dan kualitasnya.

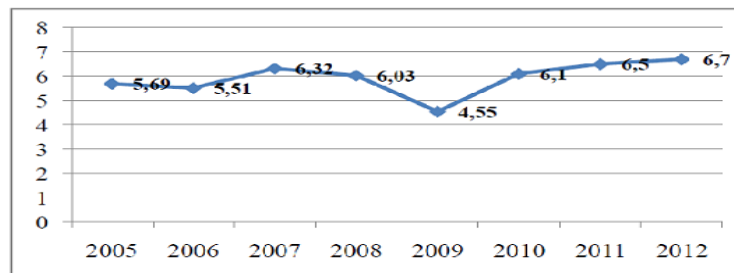
¹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. (Jakarta: Erlangga,2000)

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam industri yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat paling bawah baik dengan sendirinya maupun campur tangan pemerintah.

Faktanya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bersifat inklusif atau berkelanjutan, dikarenakan masih ada sebagian kelompok yang belum menikmati pertumbuhan ini. Selama ini, pertumbuhan ekonomi bersumber pada konsumsi dalam negeri maupun modal asing yang masuk ke sektor-sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan.

“Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semu hanya melihat dari indikator ekonomi makro. Seharusnya setiap pertumbuhan ekonomi di sebuah negara dapat berimplikasi positif terhadap berkurangnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.” anggota DPR, Hendrawan Supratikno.²

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005 - 2012 (dalam persen)



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2012

² Gatti,, *Pertumbuhan Ekonomi Belum Bersifat Inklusif*,
<http://beritamometer.com/pertumbuhan-ekonomi-belum-bersifat-inklusif/> (diakses 20April 2014)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2005 hingga 2012 cenderung mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2009 perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat terjadinya krisis global. Pada krisis global perekonomian Indonesia mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kinerja neraca pembayaran yang menurun, tekanan kepada nilai tukar rupiah, dorongan pada laju inflasi (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010). Dalam hal ini Bank Indonesia mengambil beberapa kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Perekonomian Indonesia tahun 2009 secara umum mampu melewati tantangan krisis global meskipun pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2008. Mulai tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 6,10% hal ini disebabkan masyarakat sudah mulai bangkit dari krisis global tahun sebelumnya.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Provinsi Jawa Barat memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya

pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

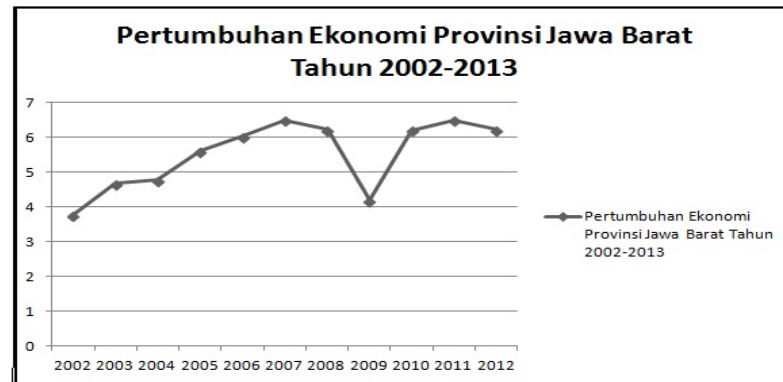
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang merasakan dampak dari krisis tahun 2008. Akibat dari krisis ini industri-industri berskala besar mengalami penurunan produksi akibatnya pengangguran semakin bertambah bahkan dapat mencapai 2,5 juta jiwa. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tengah mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor dari pelemahan daya beli pasar luar negeri.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Enam Provinsi
di Pulau Jawa Tahun 2007 - 2012 (dalam persen)

No	Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02	6,5	6,71	6,32
2.	Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14	5,84	6,01	6,34
3.	Jawa Barat	6,48	6,21	4,19	6,2	6,48	6,21
4.	DI Yogyakarta	4,31	5,03	4,43	4,88	5,16	5,32
5.	Jawa Timur	6,11	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27
6.	Banten	6,04	5,77	4,71	6,08	6,43	6,15
7.	Nasional	5,67	5,74	4,77	6,13	6,32	6,26

Berdasarkan tabel 1.1 Jawa Barat dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur pada tahun 2011 termasuk dalam daerah yang lambat. Pada tahun 2009 mengalami penurunan dan cenderung di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, ini disebabkan adanya dampak terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 6,21% hal itu terjadi seiring dengan pelemahan rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Saat ini perekonomian nasional dibayang-bayangi dengan

krisis global, ini dapat berdampak negatif pada perkembangan ekonomi. Indikasinya terlihat pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III dan IV tahun ini berpotensi tumbuh lebih lambat daripada tahun lalu.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah)

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Kabupaten/Kota 2002-2012(persen)

Krisis moneter global terasa pengaruhnya dalam tingkat pertumbuhan perekonomian daerah. Fakta yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Dari gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa dampak krisis moneter global tahun 2008 berimplikasi terhadap perekonomian Jawa Barat, hal tersebut terlihat dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi hampir disetiap Kabupaten/Kota pada tahun 2008.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota 2007-2011 (Persen)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Kab. Bogor	6.04	5.58	4.14	5.09	5.96	5.36
Kab Sukabumi	3.98	3.9	3.65	4.02	4.07	3.97
Kab Cianjur	4.18	4.04	3.93	4.53	4.74	4.28
Kab Bandung	5.92	5.3	4.34	5.88	5.94	5.48
Kab Garut	4.76	4.69	5.57	5.34	5.48	5.17
Kab Tasikmalaya	4.33	4.02	4.15	4.27	4.32	4.22
Kab. Ciamis	5.01	4.95	4.92	5.07	5.11	5.01
Kab Kuningan	4.22	4.28	4.39	4.99	5.43	4.66
Kab Cirebon	5.35	4.91	5.08	4.96	5.03	5.07
Kab Majalengka	4.87	4.57	4.73	4.59	4.67	4.69
Kab Sumedang	4.64	4.58	4.76	4.22	4.82	4.60
Kab Indramayu	2.65	4.55	1.87	4.03	4.89	3.60
Kab Subang	4.85	4.33	4.63	4.34	4.45	4.52
Kab Purwakarta	4.02	4.87	5.28	5.77	6.4	5.27
Kab Karawang	6.36	10.84	7.4	11.87	8.97	8.33
Kab Bekasi	6.14	6.07	5.04	6.18	6.26	5.94
Kab. Bandung Barat	5.35	6.95	4.64	5.47	5.75	5.60
Kab Kota Bogor	6.09	5.98	6.02	6.14	6.19	6.08
Kota Sukabumi	6.51	6.11	6.14	6.11	6.31	6.24
Kota Bandung	8.24	8.17	8.34	8.45	8.73	8.39
Kota Cirebon	6.17	5.64	5.05	3.81	5.93	5.32
Kota Bekasi	6.44	5.94	4.13	5.84	7.08	5.89
Kota Depok	7.04	6.42	6.22	6.36	6.58	6.52
Kota Cimahi	5.03	4.77	4.63	5.3	5.56	5.06
Kota Tasikmalaya	5.98	5.7	5.72	5.73	5.81	5.79
Kota Banjar	4.93	4.82	5.13	5.28	5.35	5.10

Berdasarkan data BPS dalam tabel 1.2 menyatakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu terdapat di daerah Kota Bandung sebesar 8,39%. Hal ini dikarenakan kota Bandung dapat dikatakan sebagai pusat aktivitas perekonomian Jawa Barat. Dalam hal ini kota Bandung menjadi penarik bagi kota-kota disekitarnya. Kota Bandung telah menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya, dampak yang terjadi semakin besarnya permintaan khususnya barang konsumsi dan jasa di Kota Bandung yang memiliki terhadap perkembangan positif terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007 sampai dengan 2011 di beberapa daerah mengalami kenaikan kecuali, daerah seperti Kabupaten Kuningan yang mengalami penurunan terus menerus dan pada tahun 2008 justru mengalami kenaikan sebesar 0,6% dari 4,22% pada tahun 2007 dan 4,28% tahun 2008. Begitu pun dengan Kabupaten Karawang yang mengalami kenaikan pada 2008 sebesar 0,7%.

Laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah adalah daerah Kabupaten Indramayu yang mencapai rata-rata 3,60. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi penurunan yang drastis dialami oleh Kabupaten Indramayu pada tahun 2005 sebesar -7,82% yang sebelumnya tahun 2004 mencapai 4,16%. Penurunan yang terjadi karena anjloknya produktivitas di sektor migas, karena Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang kaya akan migas.

Beberapa daerah masih belum menikmati hasil pertumbuhan ekonomi yang terjadi, membuat daerah tersebut menjadi lambat dan berdampak pertumbuhan ekonomi yang terjadi menjadi menurun. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Jawa Barat cenderung melambat walau tetap tumbuh. Namun pertumbuhannya masih belum optimal dibandingkan potensi yang dimiliki. Hal ini dilihat dari tujuh kabupaten/kota mampu menguasai 63,18% perekonomian Jawa Barat. Tujuh daerah tersebut umumnya adalah daerah-daerah yang berada Jawa Barat bagian Utara dan Tengah. Sementara itu daerah-daerah yang berada di bagian selatan seperti Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dengan 7 daerah

tersebut.³ Untuk itu, Menteri Perindustrian (Menperin) mengingatkan akselerasi pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan merata di seluruh wilayah.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), akselerasi pembangunan ekonomi di Jawa Barat begitu penting karena dari sisi geografi, Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintah dan ekonomi nasional sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pasar, keuangan dan permodalan, serta pengembangan teknologi. Namun, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mulai lambat dari tahun 2011.⁴

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi ekspor. Pertumbuhan ekspor di Jawa Barat pada triwulan II/2012 dinilai masih cukup lamban. Pertumbuhannya belum sesuai harapan untuk mengejar target pertumbuhan 6,25% sampai akhir 2012. Pertumbuhan ekspor Jawa Barat baru mencapai 0,32%. Posisi ini masih sangat lemah apabila Jawa Barat mengandalkan ekspor sebagai penggerak ekonomi rakyat.⁵ artinya semakin daerah itu melakukan kegiatan ekspor, dampaknya akan memicu naiknya pertumbuhan ekonomi. Serta, pendapatan hasil daerah pun akan bertambah.

³ *Op.cit*

⁴ Sabar, Melambat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, 10 Juni 2013 <http://www.tubasmedia.com/berita/melambat-pertumbuhan-ekonomi-jawa-barat/>(diakses 15 April 2014)

⁵ Arif Budiman, *Pertumbuhan ekspor Jawa Barat lemah*, <http://ekbis.sindonews.com/read/2012/08/06/34/663411/pertumbuhan-ekspor-jabar-lemah> 6 Agustus 2012 (diakses 15 April 2014)

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu faktor sebagai kemajuan ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang dapat dilihat dari faktor tenaga kerja dalam suatu wilayah. Pertumbuhan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling dominan. Secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan atau pembentukan *output*. Karena sumber investasi yang ada tidak akan bergerak tanpa adanya tenaga kerja. Namun, disisi lain pertumbuhan tenaga kerja yang sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian suatu daerah, yakni mencakup masalah penciptaan atau perluasan lapangan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian

suatu daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Sejak ditetapkan UU No.25/tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No.32/tahun 2004 tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa pembangunan daerah diserahkan pada masing-masing daerah, pemerintah pusat hanya sebagai pengawas/pengontrol, maka mau tidak mau masing-masing daerah harus berusaha memaksimal mungkin untuk menentukan kebijakan dan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengejar ketertinggalan daerah masing-masing.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran adanya pendapatan yaitu investasi. Investasi atau akumulasi modal faktor yang tak kalah penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal

seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Artinya semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka akan semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut.

Tahun 2003 telah ditetapkan sebagai tahun investasi bagi Indonesia. Alasannya perancangan tersebut diantaranya karena masih terbatasnya kemampuan negara membiayai investasi, sehingga Indonesia sangat memerlukan kehadiran para pemodal asing. Hal ini diperlukan untuk membuka usaha baru atau memperluas usaha yang telah mereka lakukan di negara Indonesia.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) angka persetujuan investasi di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan yang sangat tajam selama semester I tahun 2002 dibandingkan tahun 2001. PMDN turun drastis hingga 72% dari Rp. 39,788 triliun dengan 130 proyek menjadi Rp. 11,114 triliun dengan 80 proyek. Sedangkan PMA turun 42% dari 4,312 miliar dollar AS dengan 678 proyek menjadi 2,520 miliar dollar AS dengan 506 proyek (BKPM, 2003).

Kemerosotan angka persetujuan investasi itu disebabkan oleh persepsi para investor asing terhadap Indonesia yang masih negatif dikarenakan krisis moneter tahun 1998 dan iklim investasi yang masih belum kondusif.

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat

Tahun	PMA (Juta RP)	PMDN (Juta Rp)
2007	12.197.398	11.347.889
2008	25.526.575	4.075.170
2009	26.045.415	4.167.417
2010	27.942.072	18.660.542
2011	41.445.630	7.305.546

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.3, penanaman modal asing maupun modal dalam negeri mengalami fluktuasi. Penanaman modal asing mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 sebesar 12.197.398 (Juta Rp) dan pada tahun 2011 sebesar 41.445.630 (Juta Rp) dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup besar. Sedangkan penanaman modal dalam negeri mengalami fluktuasi tiap tahunnya, tahun 2008 adalah mengalami penurunan yang paling kecil dalam kurun waktu 2007-2011 sebesar 4.075.170 (Juta Rp).⁶ Semester pertama tahun 2012 angkanya hanya mencapai Rp. 175 triliun.⁷ Dalam kondisi seperti ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menjadi lebih lambat.

Investasi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat tidak setiap Kabupaten/Kota ada nilai investasinya. Hal ini dikarenakan rendahnya iklim investasi yang terjadi di daerah tersebut. Investasi yang terjadi rata-rata di setiap tahunnya yaitu daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung,

⁶ BPS Jawa Barat,realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

⁷ Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melambat.
<http://jabartoday.com/ekonomi/2013/09/10/2019/14556/pertumbuhan-ekonomi-jabar-melambat> 10 september 2013 (diakses 1april2014)

Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cirebon.

Anggota Dewan Pakar Forum ekonomi Jawa Barat Teti Armiarti mengatakan kemungkinan terburuk ekonomi Jawa Barat bisa melambat, menurut dia faktor yang mampu menghambat investasi di kawasan ini yaitu infrastruktur dan birokrasi perizinan yang berbelit-belit. Kedua faktor tersebut mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi mengenai infrastruktur serta perizinan yang rumit berakibat pada melemahnya daya saing Jawa Barat.⁸ Hambatan lainnya investasi di Jawa Barat peran investor lokal masih kalah dengan investor mancanegara. Hal itu tercermin pada tingkat kebergantungan Jawa Barat pada penanaman modal asing (PMA) yang melebihi 75 persen. Penyebaran investasi pun masih belum merata, investasi berlangsung diwilayah yang menjadi kawasan industri dan penopang Jakarta yaitu Karawang dan Bekasi.

Melihat kondisi tersebut Jawa Barat perlu meningkatkan investasi dan berupaya menciptakan iklim yang kondusif sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal itu didasari oleh keinginan kuat oleh Gubernur Jawa Barat dan membuat investasi yang lebih merata, karena investasi yang lebih merata dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi, konsumsi rumah tangga dan ekspor neto. Dilihat

⁸ Arif Budianto, Ekonomi Jawa Barat 2014 diprediksi lebih lambat, <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/11/06/33/802504/ekonomi-jabar-2014-diprediksi-lebih-lambat> 6 November 2013 (1April2014)

dari sisi penawaran agregat, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain jumlah tenaga kerja adalah teknologi. Kemajuan teknologi terjadi karena inovasi atau hal-hal baru dalam mengangani pekerjaan tradisional. Kemajuan teknologi dapat berlangsung sedemikian rupa sehingga menghemat pemakaian modal atau tenaga kerja. Penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari peningkatan *ouput*. Namun, karena jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit apabila teknologi yang digunakan semakin tinggi, maka hal ini akan menimbulkan *Trade Off* antara efisiensi produktivitas dan kesempatan kerja.⁹ Dilihat dari sisi permintaan dipengaruhi dengan pengeluaran pemerintah dan penanaman modal juga konsumsi rumah tangga dan ekspor neto yang keempatnya merupakan komponen dari pengeluaran agregat. Peranan dari pengeluaran agregat jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi dalam menentukan tingkat kegiatan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan suatu tujuan bagi semua daerah di Indonesia. Namun, untuk mencapai hal tersebut tidak mudah karena begitu kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhinya tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Maka peneliti tertarik

⁹ Prathama Prahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2001) h. 145

untuk membahas mengenai pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh Teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
4. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
5. Apakah terdapat pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Barat?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, ternyata masalah pertumbuhan ekonomi memiliki penyebab yang sangat luas dan kompleks. Karena peneliti memiliki kebatasan baik dari segi dana, waktu dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi pada masalah “Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Daerah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2004 - 2012”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang akan membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perekonomian di daerah tentang pertumbuhan ekonomi serta sebagai bahan informasi dan peneliti dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan

arah dan strategi pembangunan dimasa yang akan datang serta sebagai bahan evaluasi terhadap investasi dan pengeluaran pemerintah serta kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.